

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan membangun perekonomian ialah elemen dominan terkait kemakmuran penduduk. Apabila perekonomian berkembang maka peluang masyarakat memperoleh pendapatan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, Sukirno (2004) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dari capaian perkembangan pendapatan nasional asli yang diperoleh suatu negeri atau daerah. Oleh karenanya, pemerintah harus dapat memperhatikan kesinambungan kemajuan pertumbuhan ekonomi tiap-tiap daerah, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah sangat erat kaitannya dengan pembangunan semua aspek di pemerintahan daerah itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja daerah yang dilandaskan pada kebutuhan daerah terkait dengan sarana dan prasarana guna memperlancar kinerja pemerintah serta meningkatkan fasilitas publik (Priambudi,2016). Daerah-daerah di Indonesia seharusnya berlomba dalam meningkatkan pembangunan daerahnya masing-masing, namun realitasnya daerah di Indonesia lebih banyak memberikan alokasi dana terhadap sektor-sektor yang kurang dibutuhkan, serta lebih tingginya penggunaan dana untuk belanja rutin (Putriasni, 2014).

Adanya UU terkait Pemerintah Daerah no. 22 tahun 1999 serta UU no. 25 mengenai Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per 1 Januari 2001, dan diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 serta UU

Nomor 33 Tahun 2004, telah mewadahi keluasan wewenang pada pemerintah daerah mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan pemerintah daerah lebih mengenal kondisi daerahnya masing-masing dan dapat mengetahui kebutuhan prioritas daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan Sidik (2002) mengatakan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat mencari dan mengetahui sumber keuangan yang terdapat di daerah khususnya yang merupakan PAD.

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah berdasarkan provinsi di Indonesia hanya mencapai 37,8% dari total pendapatan setiap daerah pada tahun 2019, rata-rata ini masih di bawah capaian 70% (BPS, 2021). Hal ini mengindikasikan belum cukupnya kemandirian daerah dan masih sangat tergantung pada pusat terkait pembangunan meskipun telah diberikan otonomi pada masing-masing daerah. Penyebab rendahnya persentase PAD dari pendapatan daerah ini dapat disebabkan kurangnya kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan dan mengidentifikasi sumber yang potensial untuk pendapatannya. Selain itu, pengaruh dari belum optimalnya pemasukan pajak daerah, retribusi dan perolehan sumber kekayaan daerah yang dipisahkan juga mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh. Sebagian besar pemerintah daerah juga masih beranggapan bahwa PAD yang rendah adalah akibat dari terbatasnya ruang untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Hal ini diikuti dengan penerimaan pajak-pajak besar yang diperoleh pusat, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Ditambah tidak meratanya pemahaman masyarakat mengenai pajak dan retribusi daerah serta kurangnya sosialisasi dapat menurunkan penerimaan pendapatan daerah, Halim (2004).

Usaha dalam peningkatan PAD harus dibarengi dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disebabkan ketika PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan dan berdampak pada pembangunan daerah. Suatu potensi penerimaan pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan adalah pajak serta retribusi daerah. Penerimaan yang bersumber dari pajak biasanya digunakan untuk pembiayaan yang bersifat publik, sedangkan retribusi digunakan untuk jasa layanan bersifat semi publik (Saragih,2003)

Selain Pendapatan Asli Daerah, belanja modal juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan belanja modal yang bersumber dari pemerintah pusat dan PAD memiliki fungsi strategis guna membiayai pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dalam masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan sumber pendapatan yang mereka miliki dengan melakukan belanja modal yang mengalami kenaikan guna mendorong pembangunan di bidang-bidang produktif di daerah (Mardiasmo, 2002).

Wong (2004) menyebutkan pembangunan infastruktur industri dapat berimbas kepada naiknya pajak daerah secara nyata. Fasilitas publik yang memadai membuat masyarakat merasakan kesejahteraan sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi secara efisien dan meningkatnya partisipasi publik dalam aspek pembangunan. Dengan meningkatnya investasi modal dapat membantu memberikan layanan publik yang berkualitas sehingga terjadinya peningkatan terhadap ikut serta publik dalam kegiatan pembangunan yang merupakan cerminan dari PAD yang meningkat (Mardiasmo, 2002)

Dari uraian tersebut, tergambar suatu keadaan yang menunjukkan munculnya indikasi perkembangan alokasi dana belanja yang cukup besar dengan diikuti adanya pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi yang setara, artinya tujuan pemerintah daerah dengan menerapkan kebijakan fiskal terutama usaha pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran belanja modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi dengan lebih baik.

Variabel belanja modal digunakan karena belanja modal dimanfaatkan pemerintah daerah untuk pemberdayaan pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, layanan transportasi, yang dimaksudkan bahwa masyarakat dapat merasakan dampak dari adanya pembangunan di daerah. Dengan adanya infrastruktur yang memadai sehingga menghasilkan efisiensi dan efektifitas dalam segala bidang, dengan harapan meningkatnya produktifitas masyarakat akan berdampak dengan adanya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Akan tetapi, dengan munculnya harapan terkait belanja modal yang merupakan aspek utama terkait upaya menunjang pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan suatu masalah terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah, dimana belanja modal yang tidak sesuai penggunaannya secara baik dan optimal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersendat. Oleh sebab itu pentingnya penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap belanja modal sesuai dengan aturan perundang-undangan, (litahamaputty, 2015)

Longaday (2007) Kurangnya efektivitas belanja modal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dikarenakan pos-pos belanja yang tidak sesuai apa yang dibutuhkan daerah. Hal ini tidak akan mendorong iklim perekonomian daerah ke arah yang positif dikarenakan minimnya pengeluaran belanja daerah yang

langsung memberikan peningkatan atau perbaikan dari sisi infrastruktur. Diperlukan analisis mendalam bagi setiap daerah untuk mengalokasikan pos-pos belanjanya dengan tepat untuk benar-benar memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, dengan munculnya harapan terkait belanja modal sebagai aspek penting dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi menimbulkan suatu masalah terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi nyata apabila anggaran belanja modal tidak terealisasi dengan maksimal dan terjadinya anggaran yang belum dimanfaatkan. Dana yang belum digunakan atau sisa dana disebut dengan SiLPA. Dalam pandangan yang positif SiLPA dapat berupa efisiensi serta afektifitas dari anggaran, tetapi dalam kenyataannya jarang dijumpai SiLPA dengan hasil yang demikian dalam badan pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia, bahkan yang terjadi adalah SiLPA yang bersifat negatif. Gejala-gejala terkait SiLPA yang bersifat negatif disebabkan dari pemanfaatan anggaran yang tidak berjalan dengan baik, oleh sebab itu SiLPA dapat dikatakan muncul akibat ketidak telitian dalam menyusun anggaran serta kurang efisien dalam memanfaatkan anggaran yang mengakibatkan rencana serta kegiatan program-program tidak terealisasi secara maksimal (Mahmudi,2010)

Dana SiLPA yang melebihi kapasitas hendaknya dielakkan, dikarenakan SiLPA ialah dana yang tidak terpakai (*idle fund*), jikalau tidak adanya pemanfaatan secara optimal, sehingga tidak munculnya efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perkenomian suatu daerah. Dengan fakta terkait SiLPA tersebut, maka pemberdayaan SiLPA yang optimal sangat penting bagi pemerintah daerah. Dengan adanya SiLPA yang cukup besar hendaknya perlu untuk diminimalisir, satu dari

banyak cara yakni optimalisasi dalam pemanfaatan SiLPA dari periode sebelumnya guna melakukan peningkatan dalam menyerap belanja modal. Pemakaian SiLPA di periode yang telah berlalu dianggap menyebabkan dampak yang positif untuk penggunaan belanja modal. Dengan dilakukannya pemanfaatan SiLPA pada periode sebelumnya terkait upaya peningkatan serapan belanja modal bisa berdampak pada stimulasi terhadap meningkatnya pelayanan kepada publik dan pertumbuhan serta produktifitas kegiatan ekonomi daerah. Gounder (2007) menyebutkan terjadinya korelasi jangka pendek dan panjang pada belanja pemerintah serta pendapatan pemerintah dan melingkupi aspek-aspeknya, namun Damanik (2021) menyatakan bahwa Sumatera utara tidak sejalan dengan temuan Gounder tersebut.

Dalam penelitian Simbolon (2020) Provinsi yang ada di Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Bengkulu tidak dapat dilakukannya modernisasi yang berkaitan dengan SiLPA terhadap alokasi anggaran belanja modal yang dikarenakan oleh masalah yang terjadi pada agen-agen eksekutif atau pemerintah pusat dalam penyusunan serta membentuk APBD, hal tersebut disebabkan oleh adanya asimetri informasi. Pertumbuhan ekonomi dengan PAD memiliki pengaruh secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, maka terjadinya kenaikan tingkat konsumsi dan produktivitas. Oleh karena itu secara garis besar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah berjalan dengan lancar maka belanja modal, yang dikerluarkan oleh daerah itu akan meningkat pula yang berguna untuk melengkapi sarana dan prasarana daerah. Berdasarkan uraian tersebut, judul skripsi penulis dalam penelitian ini

adalah “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi di Regional Sumatera Tahun 2013-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari fenomena latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di regional Sumatera pada tahun 2013-2017 ?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di regional Sumatera pada tahun 2013-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di regional Sumatera pada tahun 2013-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di regional Sumatera pada tahun 2013-2017 ?
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di regional Sumatera pada tahun 2013-2017 ?

Untuk mengetahui pengaruh SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di regional Sumatera pada tahun 2013-2017 ?